



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen.M.T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317
JAMBI – 36122

Jambi, 3 April 2024

Nomor : UND- 31/ITPROV-1.1/V/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan Rapat Penyampaian Laporan
Realisasi Capaian Kinerja, Keuangan
dan Kebijakan Triwulan I Inspektorat
Daerah Provinsi Jambi

Yth, Pejabat Struktural, JFT dan
Staf Terkait
di-
Jambi

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta menindaklanjuti penyampaian Laporan Realisasi Capaian Kinerja, Keuangan dan Kebijakan Triwulan I Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagaimana terlampir.

Sehubungan hal tersebut di atas, kami mengundang Saudara untuk dapat hadir pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 5 April 2024
Pukul : 08.30 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Inspektorat Jambi
Acara : Rapat penyampaian Laporan Realisasi Capaian
Kinerja, Keuangan dan Kebijakan Triwulan I
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



INSPEKTUR,

H. ACUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP

Pembina Utama Madya

NIP. 19690818 199703 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen M.T. Haryono No. 2, Telanaipura, Jambi
Telp.(0741) 61606 – Fax. (0741) 62317, Website : www.inspektorat@jambiprov.go.id

NOTULEN RAPAT

Hari/Tgl : Jumat, 5 April 2024
Waktu : 08.30 Wib s.d Selesai
Materi : Rapat Evaluasi Renja Triwulan I Tahun 2024
Pimpinan Rapat : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
Peserta : (Datar Terlampir)

A. Pemaparan (Pimpinan Rapat)

Menindaklanjuti Pasal 181 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya Pemerintah Pusat Mendorong Pemerintah Daerah agar dapat mempercepat pelaksanaan dan realisasi Program Kegiatan yang telah di anggarkan/disusun. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi adalah salah satu bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini sebagaimana yang di jelaskan di dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 tahun 2021 tentang "Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi", pada Pasal 3 yang berbunyi : Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. Kesimpulan Rapat antara lain :

1. Dalam rangka monitoring dan evaluasi internal akan dilaksanakan rapat berkala secara intern Bidang/Seksi yang melaksanakan kegiatan, sehingga akan mempercepat pelaksanaan kegiatan baik serapan maupun realisasi akan dicapai.
2. Dalam rangka upaya percepatan realisasi kegiatan triwulan I tahun 2024 berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capain kegiatan masih rendah dari target yang telah ditetapkan yang tertuang dalam anggaran kas pada SIPD.
3. Rapat berjalan dengan lancar dan dilaksanakan dengan mekanisme diskusi dan tanya jawab kepada masing – masing Penanggung Jawab Teknis Kegiatan, sudah sejauh mana serapan dari masing – masing kegiatan.
4. Dalam diskusi tersebut juga di bahas kendala dan permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga serapan kegiatan dipandang masih rendah dari yang di harapkan. (Terlampir)

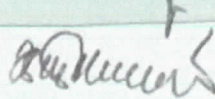
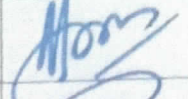
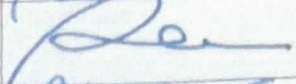
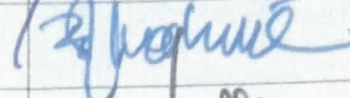
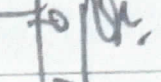
Jambi,
NOTULIS,

Warisno, S.E., M.Si

Kasubbag Perencanaan & Keuangan
NIP. 19710322 199111 1 001

Rapat penyampaian Laporan Realisasi Capaian Kinerja, Keuangan dan Kebijakan
Triwulan I Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
Jum'at, 5 April 2024



NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. AGUS HERTANTO	INSPEKTUR	
2	Mat Samsi	Irbanur	
3	Reza Fachrila	Irban III	
4	Mahrup	Sekretaris	
5	Yopie . R	IRBAN I	
6	M. Nairi	IRBAN IV	
7	HM Saman . K	IRBAN V	
8	WARISTO	Kasubag PK	
9	Rini Rani	Auditor Madya	
10	Ayu Septi Indriani	PPPD Madya	
11	Herlina	PPPD Madya	
12	M. MUSTOFA	Kasubag evlap	
13	Teti HN	PPPD Madya	
14	Widi yulianti	Auditor	
15	Ermita	Auditor	

Evaluasi Renja

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI
RENJA PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI
PERIODE PELAKSANAAN : 2024

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:

- 1 Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat
- 2 Persentase tindak lanjut temuan BPK RI
- 3 Nilai Capaian MCP KPK
- 4 Tingkat Maturlitas SPJP
- 5 Tingkat Kapabilitas APJP
- 6 Indeks kepuasan audit atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah
- 7 Persentase APJP yang memiliki sertifikat kompetensi Profesi

Target Realisasi	
70	72
71	65
0	
3	3
3	3
84,5	85
25	23

No	Sasaran	Kode	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Trivulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						I	II		III	IV	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Sesuai PKPT	Persen	80	46.144.000.791	90,83	76	5.226.553.042	94,12	648.223.723		94,12	648.223.723	123,84	12,40	92,475	648.223.723	115,59	1,40	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal	Persen	80	40.490.096.200	90,83	76	3.998.843.420	88,24	596.526.123		88,24	596.526.123	116,11	14,92	89,535	596.526.123	111,92	1,47	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	LAPORAN	280	9.313.918.391	54	56	753.664.000	14	122.588.157		14	122.588.157	25,30	16,27	68	122.588.157	24,29	1,32	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	LAPORAN	201	7.113.238.783	40	40	944.075.000	10	80.863.000		10	80.863.000	25,30	8,57	50	80.863.000	24,88	1,14	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.02.1.01.0003	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	LAPORAN	109	637.597.235	21	21	129.278.000	6			6		28,57		20		24,77		Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.02.1.01.0004	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	LAPORAN	279	1.466.473.640	55	55	520.598.060	16	137.550.000		16	137.550.000	29,99	26,42	71	137.550.000	25,45	9,38	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	LAPORAN	107	13.702.729.693	21	21	840.796.160	6			6		28,57		20		25,23		Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	DOKUMEN	775	8.256.138.458	155	155	810.432.200	41	255.524.966		41	255.524.966	26,45	31,53	196	255.524.966	25,29	3,09	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.02.1.02	Penyelenggaraan pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pelaksanaan pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persen	100	5.653.904.591	42,86	100	1.227.709.622	100	51.697.600		100	51.697.600	100,00	4,21	71,43	51.697.600	71,43	0,91	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.02.1.02.0001	Perancangan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Tuntutan Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	LAPORAN	10	415.598.950	2	2	166.971.210								2		20,00		Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	LAPORAN	95	5.238.305.641	19	19	1.060.738.412	7	51.697.600		7	51.697.600	36,94	4,87	26	51.697.600	27,37	0,99	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan	Persen	60	14.441.916.279	34,56	48	2.026.107.595	35,35	107.775.620		35,35	107.775.620	73,85	5,32	34,955	107.775.620	58,26	0,75	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis yang selesai dirumuskan	REKOMENDASI	45		7	7	141.511.160	4			4		57,14		11		24,44		Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	REKOMENDASI	45	0	7	7	141.511.160	4			4		57,14		11		24,44		Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang diberikan Pendampingan dan Asistensi	Persen	100	14.441.916.279	34,56	100	1.884.596.435	69,7	107.775.620		69,7	107.775.620	69,70	5,72	52,13	107.775.620	52,13	0,75	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Usuran Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	215	3.078.032.227	33	43	234.620.000	13	23.100.000		13	23.100.000	30,23	9,85	46	23.100.000	21,40	0,75	Inspektorat Daerah Provinsi
Rata-rata capaian kinerja (%)						180.496.060.113				36.647.648.577	3.610.553.350			40,01	3.610.553.350	40,31	9,85		3.610.553.350	38,03	2,00	
Predikat: Kinerja														SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam trivulan berikutnya*):																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																						

Evaluasi Renja

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Trwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											I	II	III	IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13			16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	
		6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	PERANGKAT DAERAH	215	936.261.125	23		43	162.031.060	10					10		23,26		33		15,35	Inspektorat Daerah Provinsi		
		6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	KEGIATAN	238	7.225.670.700	41		46	1.288.940.315	13	73.578.000				13	73.578.000	28,26	5,71	5%	73.578.000	22,69	1,02	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	PERANGKAT DAERAH	31	3.201.952.227	4		6	199.005.060		11.097.620					11.097.620	5,58	4		11.097.620	12,90	0,35	Inspektorat Daerah Provinsi	
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat APJP	B	0	119.912.143.043	81		81	29.394.987.940	81	2.854.554.007				81	2.854.554.007	100,00	9,71	162	2.854.554.007		2,38	Inspektorat Daerah Provinsi	
		X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang selesai dirumuskan	DOKUMEN	109	1.711.749.961	21		21	714.110.920	3	349.410.600				3	349.410.600	14,29	48,93	24	349.410.600	22,02	20,41	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DOKUMEN	24	902.270.120	4		4	199.794.168	1	149.988.260				1	149.988.260	25,30	75,07	5	149.988.260	20,83	16,62	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LAPORAN	85	809.479.841	17		17	514.316.752	5	199.422.340				5	199.422.340	29,41	38,77	22	199.422.340	25,88	24,64	Inspektorat Daerah Provinsi	
		X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Persen	100	82.323.961.915	108,16		100	20.061.211.533	100	1.576.241.700				100	1.576.241.700	100,00	7,86	104,08	1.576.241.700	104,08	1,01	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	500	82.323.961.915	108,16		100	20.061.211.533	100	1.576.241.700				100	1.576.241.700	100,30	7,86	208,16	1.576.241.700	41,63	1,91	Inspektorat Daerah Provinsi	
		X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persen	100	12.443.938.528	54,29		100	2.537.849.075		469.277.566					469.277.566		18,49	27,145	469.277.566	27,15	3,77	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	370	12.443.938.528	115,71		75	2.537.849.075		469.277.566					469.277.566		18,49	115,71	469.277.566	31,27	3,77	Inspektorat Daerah Provinsi	
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Persen	100	9.681.169.892	35,59		100	1.756.114.208	93,75	268.490.472				93,75	268.490.472	93,75	15,29	64,67	268.490.472	64,67	2,77	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	PAKET	60	162.447.207	12		12	32.449.318										12		20,00		Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	PAKET	60	451.757.905	12		12	99.995.100	3	8.900.000				3	8.900.000	25,30	8,90	15	8.900.000	25,00	1,97	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	PAKET	144	883.095.995	28		28	151.020.000	7	2.569.000				7	2.569.000	25,30	1,70	35	2.569.000	24,31	0,29	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	PAKET	60	636.507.184	12		12	127.600.250	3					3		25,30		15		25,00		Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	132.386.125	12		12	29.062.837	3					3		25,30		15		25,00		Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LAPORAN	2.500	7.414.975.476	500		500	1.315.986.793	125	257.021.472				125	257.021.472	25,30	19,53	625	257.021.472	25,00	3,47	Inspektorat Daerah Provinsi	
		X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persen	100	2.480.000.000	100		100	1.359.946.830										50		50,00		Inspektorat Daerah Provinsi	
Rata-rata capaian kinerja (%)							180.498.060.113				36.647.648.577		3.610.553.350				40,01	3.610.553.350	40,91	9,85		3.610.553.350	36,03	2,00		
Predikat Kinerja																	SR	SR					SR	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam trwulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renstra Perangkat Daerah berikutnya*):																										

 Disahkan
 27 April 2019
 DISKUSI III

Dievaluasi
27 April 2024
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Ir. Agus Sunaryo, M.Si
NIP. 196608141993031004



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen.M.T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317
JAMBI – 36122

Jambi, 4 Juli 2024

Nomor : UND- 55/ITPROV-1.1/VII/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan Rapat Penyampaian Laporan
Realisasi Capaian Kinerja, Keuangan
dan Kebijakan Triwulan II Inspektorat
Daerah Provinsi Jambi

Yth, Pejabat Struktural, JFT dan
Staf Terkait
di-
Jambi

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta menindaklanjuti penyampaian Laporan Realisasi Capaian Kinerja, Keuangan dan Kebijakan Triwulan II Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagaimana terlampir.

Sehubungan hal tersebut di atas, kami mengundang Saudara untuk dapat hadir pada :

Hari/Tanggal : Senin, 8 Juli 2024
Pukul : 08.30 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Inspektur Provinsi Jambi
Acara : Rapat penyampaian Laporan Realisasi Capaian
Kinerja, Keuangan dan Kebijakan Triwulan II
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



INSPEKTUR,

H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP

Pembina Utama Madya

NIP. 19690818 199703 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen.M.T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317
JAMBI – 36122

NOTULEN RAPAT

Hari/Tgl : Senin, 8 Juli 2024
Waktu : 08.30 Wib s.d Selesai
Materi : Rapat Evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2024
Pimpinan Rapat : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
Peserta : (Datar Terlampir)

A. Pemaparan (Pimpinan Rapat)

Menindaklanjuti Pasal 181 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya Pemerintah Pusat Mendorong Pemerintah Daerah agar dapat mempercepat pelaksanaan dan realisasi Program Kegiatan yang telah di anggarkan/disusun. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi adalah salah satu bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini sebagaimana yang di jelaskan di dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 tahun 2021 tentang “Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi”, pada Pasal 3 yang berbunyi : Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

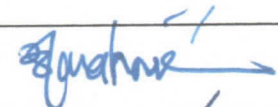
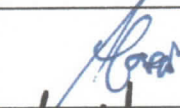
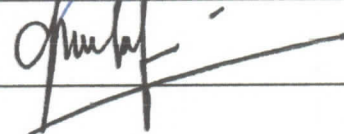
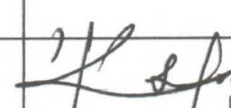
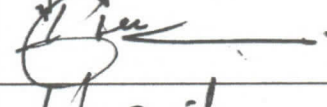
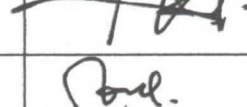
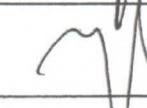
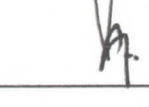
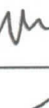
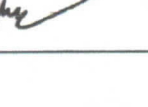
B. Kesimpulan Rapat antara lain :

1. Dalam rangka monitoring dan evaluasi internal akan dilaksanakan rapat berkala secara intern Bidang/Seksi yang melaksanakan kegiatan, sehingga akan mempercepat pelaksanaan kegiatan baik serapan maupun realisasi akan dicapai.
2. Dalam rangka upaya percepatan realisasi kegiatan triwulan II tahun 2024 berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capain kegiatan masih rendah dari target yang telah ditetapkan yang tertuang dalam anggaran kas pada SIPD.
3. Rapat berjalan dengan lancar dan dilaksanakan dengan mekanisme diskusi dan tanya jawab kepada masing – masing Penanggung Jawab Teknis Kegiatan, sudah sejauh mana serapan dari masing – masing kegiatan.
4. Dalam diskusi tersebut juga di bahas kendala dan permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga serapan kegiatan dipandang masih rendah dari yang di harapkan (Terlampir).

Jambi,
NOTULIS,

Hj. Yunita Meri Rahmi, S.E.,M.M
Kasubbag Perencanaan & Keuangan
NIP. 19770314 200012 2 004

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	H. Agus Murtanto, S.H. AGIB, - CCHAS, JAMP.	INSPEKTUR	
2	Drs. Mahrup, M.Si	SEKRETARIS	
3	Hasian Karamay, S.E. MUI	KASUB.bag. UMUM.	
4	Dr. M. Mustafa, S.Stp. M.PA	KASUB.bag. EVALAP.	
5	Mat Sanusi, SP. CPA. AGIA - PAK	IRBANSUS	
6	H. Mohd. Saman, K. S.E	IRBAN I	
7	Yopie Said Ramadhany, S.E	IRBAN II	
8	HERYANTO, S.KM. MG	PERENCANAAN	
9	Hj. Yuliatin Ningsih, S.Pd. M.H.	PERENCANAAN	
10	Danny Purwacaraka, S.E	PERENCANAAN	
11	M. ICHWAN, SE.MM	PERENCANAAN	
12	HENDRA WIJAYA, S.IP	PERENCANAAN	
13	Kusyono	PERENCANAAN	
14	FITRIA ANGGRENI, S.Pt	PERENCANAAN	
15	Adi Pratama, S.Pt	PERENCANAAN	
16	Mawon, S.KM.	Perencanaan	
17	Yuliatin Ningsih	Perencanaan	
18	Saripa Lalla.	IRBAN. III/UMS	
19	WINDI INDRIANI	PPWP D	
20	Yusnizar	PPWP D	
21			

**Dokumentasi Rapat Penyampaian Laporan Realisasi Capaian Kinerja, Keuangan
dan Kebijakan Triwulan II Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
Senin, 8 Juli 2024**



Evaluasi Renja

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI
RENJA PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PROVINSI JAMBI
PERIODE PELAKSANAAN : 2024

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD.

Target Realisation

1. Persentase tindak lanjut temuan Inspektorer
2. Persentase tindak lanjut temuan BPK RI
3. Nilai Capaian MCP KPK
4. Tingkat Maturlitas SPIP
5. Tingkat Kapabilitas APIP
6. Indeks kepuasan audi terhadap kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorer Daerah
7. Persentase APIP yang memiliki sertifikat kompetensi Profesi

70	7
71	69.5
0	
3	
3	
84.5	8
25	2

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah smpai dengan Rangja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Trivulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	I	II						III	IV	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 ÷ 13	16 = 15 / 6 x 100%	17					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berahli, transparan,akuntabel dan kapabel	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyenggaraan Pengawasan Sesuai PIKPT	Person	80	46.144.000.791	90,83		76	5.226.553.042	94,12	648.223.723	94,12	1.824.725.998			94,12	2.472.949.721	123,84	47,32	92,475	2.472.949.721	115,59	5,36	Inspektort Daerah Provinsi
		6.01.02.1.01	Penyenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal	Person	80	40.490.096.200	90,83		76	3.998.843.420	88,24	596.526.123	88,24	1.240.361.765			88,24	1.836.887.888	116,11	45,94	89,535	1.836.887.888	111,82	4,54	Inspektort Daerah Provinsi
		6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	LAPORAN	280	9.313.918.391	54		56	753.664.000	14	122.588.157	14	469.245.560			28	591.833.717	50,00	78,53	82	591.833.717	29,29	6,35	Inspektort Daerah Provinsi
		6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	LAPORAN	201	7.113.238.783	40		40	944.075.000	10	80.863.000	10	241.751.575			20	322.614.575	50,00	34,17	60	322.614.575	29,85	4,54	Inspektort Daerah Provinsi
		6.01.02.1.01.0003	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	LAPORAN	109	637.597.235	21		21	129.276.000	6		69.111.050			6	69.111.050	28,57	53,46	27	69.111.050	24,77	10,84	Inspektort Daerah Provinsi	
		6.01.02.1.01.0004	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	LAPORAN	229	1.466.473.640	55		55	520.598.080	16	137.550.000	13	77.335.175			29	214.885.175	52,73	41,28	84	214.885.175	30,11	14,65	Inspektort Daerah Provinsi
		6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	LAPORAN	107	13.702.729.693	21		21	840.796.160	6		248.369.205			6	248.369.205	26,57	29,54	27	248.369.205	25,23	1,81	Inspektort Daerah Provinsi	
		6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	DOKUMEN	775	8.256.138.458	155		155	810.432.200	41	255.524.966	38	134.549.200			79	390.074.166	50,97	48,13	234	390.074.166	30,19	4,72	Inspektort Daerah Provinsi
		6.01.02.1.02	Penyenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan Tertentu	Person	100	5.653.904.591	42,86		100	1.227.709.622	100	51.697.600	100	584.384.233			100	636.061.833	100,00	51,81	71,43	636.061.833	71,43	11,25	Inspektort Daerah Provinsi
		6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Tuntutan Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	LAPORAN	10	415.598.950	2		2	166.571.210			86.703.405				86.703.405		51,93	2	86.703.405	20,00	20,86	Inspektort Daerah Provinsi	
		6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	LAPORAN	95	5.238.305.641	19		19	1.060.738.412	7	51.697.600	4	497.660.828			11	549.358.428	57,89	51,79	30	549.358.428	31,58	10,49	Inspektort Daerah Provinsi
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan	Person	60	14.441.916.279	34,56		48	2.026.107.595	35,35	107.775.620	35,35	516.254.645			35,35	624.030.265	73,65	30,80	34,955	624.030.265	58,26	4,32	Inspektort Daerah Provinsi
		6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis yang selesai dirumuskan dan fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis yang selesai dirumuskan dan fasilitasi Pengawasan	REKOMENDASI	45		7		7	141.511.160	4		12.841.580			4	12.841.580	57,14	9,07	11	12.841.580	24,44		Inspektort Daerah Provinsi	
		6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	REKOMENDASI	45		0		7	141.511.160	4		12.841.580			4	12.841.580	57,14	9,07	11	12.841.580	24,44		Inspektort Daerah Provinsi	
		6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang diberikan	Person	100	14.441.916.279	34,56		100	1.884.596.435	60,7	107.775.620	60,7	503.413.065			60,7	611.188.685	69,70	32,43	52,13	611.188.685	52,13	4,23	Inspektort Daerah
Rata-rata capaian kinerja (%)						180.498.060.113					36.647.648.577		3.610.553.350		11.975.978.275			56,70	15.586.531.625	56,70	42,53		15.586.531.625	42,67	8,64	
Predikat Kinerja																		R	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindakan lanjut yang diperlukan dalam trivulan berikutnya*):																										
Tindakan lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										

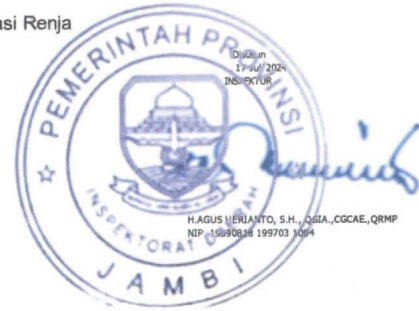
Evaluasi Renja

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Realisasi Kinerja Pada Trivulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
									I	II	III	IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13		14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Provinsi
		6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	PERANGKAT DAERAH	215	3.078.032.227	33	43	234.620.000	13	23.100.000	10	137.367.057		23	160.467.057	53,49	68,39	56	160.467.057	26,05	5,21	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	PERANGKAT DAERAH	215	936.261.125	23	43	162.031.060	10		90.157.000		10	90.157.000	23,26	55,64	33	90.157.000	15,35	9,63	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	KEGIATAN	238	7.225.670.700	41	46	1.288.940.315	13	73.578.000	11	236.176.548		24	309.754.548	52,17	24,03	65	309.754.548	27,31	4,29	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Peningkatan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Peningkatan Integritas	PERANGKAT DAERAH	31	3.201.952.227	4	6	199.005.060		11.097.620	2	39.712.460		2	50.810.080	33,33	25,53	6	50.810.080	19,35	1,59	Inspektorat Daerah Provinsi
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat APDP	B	0	119.912.143.043	81	81	29.394.987.940	81	2.854.554.007	9.634.997.632		81	12.489.551.639	100,00	42,48	162	12.489.551.639		10,42	Inspektorat Daerah Provinsi	
		X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang selesai dirumuskan	DOKUMEN	109	1.711.749.961	21	21	714.110.920	3	349.410.600	6	109.540.200		9	458.980.800	42,86	84,27	30	458.980.800	27,52	26,81	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DOKUMEN	24	902.270.120	4	4	199.794.168	1	149.988.260	1	7.974.000		2	157.962.260	50,00	79,06	6	157.962.260	25,00	17,51	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LAPORAN	85	809.479.841	17	17	514.316.752	5	199.422.340	4	101.566.200		9	300.988.540	52,94	58,52	26	300.988.540	30,59	37,18	Inspektorat Daerah Provinsi
		X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Persen	100	82.323.961.915	108,16	100	20.061.211.533	100	1.576.241.700	107	8.072.236.339		107	9.648.478.039	107,00	48,10	107,58	9.648.478.039	107,58	11,72	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	500	82.323.961.915	108,16	100	20.061.211.533	100	1.576.241.700	107	8.072.236.339		107	9.648.478.039	107,00	46,10	215,16	9.648.478.039	43,03	11,72	Inspektorat Daerah Provinsi
		X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persen	100	12.443.938.528	54,29	100	2.537.849.075	469.277.566	163,16	514.651.812		163,16	983.929.378	163,16	38,77	108,725	983.929.378	108,73	7,91	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	370	12.443.938.528	115,71	75	2.537.849.075	469.277.566	31	514.651.812		31	983.929.378	41,33	36,77	146,71	983.929.378	39,65	7,91	Inspektorat Daerah Provinsi	
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Persen	100	9.681.169.892	35,59	100	1.756.114.298	93,78	268.490.472	93,78	562.135.610		93,78	830.626.082	93,78	47,30	64,67	830.626.082	64,67	8,58	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	PAKET	60	162.447.207	12	12	32.449.318			10.388.540			10.388.540		32,01	12	10.388.540	20,00	6,40	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	PAKET	60	451.757.905	12	12	99.995.100	3	8.900.000	3	33.080.030		6	41.980.030	50,00	41,98	18	41.980.030	30,00	9,29	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	PAKET	144	883.095.995	28	28	151.020.000	7	2.569.000	7	8.569.000		14	11.138.000	50,00	7,38	42	11.138.000	29,17	1,26	Inspektorat Daerah Provinsi
Rata-rata capaian kinerja (%)							180.498.060.113			36.647.648.577		3.610.553.350	11.975.978.275		56,70	15.586.531.625	56,70	42,53		15.586.531.625	42,87	8,64		
Predikat Kinerja															R	SR					SR	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam trivulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																								

Evaluasi Renja

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Trivulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
									I		II							III		IV					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13		14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	PAKET	60	636.507.184	12	12	127.600.250	3			61.762.000			3	61.762.000	25,00	48,40	15	61.762.000	25,00	9,70	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	132.386.125	12	12	29.062.837	3			750.000			3	750.000	25,00	2,58	15	750.000	25,00	0,57	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LAPORAN	2.500	7.414.975.476	500	500	1.315.986.793	125	257.021.472	125	447.586.040			250	704.607.512	50,00	53,54	750	704.607.512	30,00	9,50	Inspektorat Daerah Provinsi
		X.XXX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persen	100	2.480.000.000	100	100	1.359.946.830									80		50,00			Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	UNIT	239	2.480.000.000	7	8	1.359.946.830									7		2,93			Inspektorat Daerah Provinsi	
		X.XXX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor	Persen	100	4.789.248.250	100	100	1.198.296.084	100	160.324.069	100	167.189.537			100	327.513.606	100,00	27,33	100	327.513.606	100,00	6,84	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	LAPORAN	60	335.971.660	12	12	101.975.520	3	24.704.000	3	23.832.500			6	48.536.500	50,00	47,60	18	48.536.500	30,00	14,45	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	LAPORAN	60	1.367.683.502	12	12	372.545.000	3	70.766.469	3	61.762.055			6	132.528.524	50,00	35,57	18	132.528.524	30,00	9,69	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	LAPORAN	60	451.757.905	12	12	49.737.500	3	10.300.000	3	3.582.300			6	13.882.300	50,00	27,91	18	13.882.300	30,00	3,07	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	LAPORAN	60	2.633.835.183	12	12	674.038.064	3	54.553.600	3	78.012.682			6	132.566.282	50,00	19,67	18	132.566.282	30,00	5,03	Inspektorat Daerah Provinsi
		X.XXX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Persen	100	6.482.074.497	69,76	100	1.767.459.200	100	30.809.600	100	209.244.134			100	240.053.734	100,00	13,58	84,88	240.053.734	84,88	3,70	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	UNIT	56	787.999.660	10	13	283.270.000	3	9.827.400	3	79.495.749			6	89.323.149	46,15	31,53	16	89.323.149	26,57	11,34	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	UNIT	112	1.554.672.935	21	24	325.490.000	6	1.475.000	6	74.587.142			12	76.062.142	50,00	23,37	33	76.062.142	29,46	4,89	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	UNIT	170	900.900.310	170	170	177.990.000	44	7.384.000	42	30.914.843			86	38.298.043	50,59	21,52	256	38.298.043	150,59	4,25	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	UNIT	14	3.238.501.592	4	2	980.709.200		12.123.200	0,5	24.246.400			0,5	36.369.600	25,00	3,71	4,5	36.369.600	32,14	1,12	Inspektorat Daerah Provinsi
Rata-rata capaian kinerja (%)							180.498.060.113			36.647.648.577		3.610.553.350		11.975.978.275			56,70	15.586.531.625	56,70	42,53		15.586.531.625	42,87	8,64	
Predikat Kinerja																	R	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam trivulan berikutnya*):																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																									

Evaluasi Renja



Direktori
17 Juli 2024
INSPEKTOR
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Ir. Agus Sunaryo, M.Si
NIP. 196608141993031004



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen.M.T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317
JAMBI – 36122

Jambi, 4 Oktober 2024

Nomor : UND- 88/ITPROV-1.1/X/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan Rapat Penyampaian Laporan
Realisasi Capaian Kinerja, Keuangan
dan Kebijakan Triwulan III Inspektorat
Daerah Provinsi Jambi

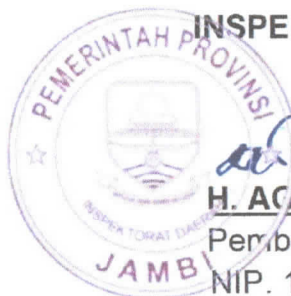
Yth, Pejabat Struktural, JFT dan
Staf Terkait
di-
Jambi

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta menindaklanjuti penyampaian Laporan Realisasi Capaian Kinerja, Keuangan dan Kebijakan Triwulan III Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagaimana terlampir.

Sehubungan hal tersebut di atas, kami mengundang Saudara untuk dapat hadir pada :

Hari/Tanggal : Senin, 7 Oktober 2024
Pukul : 08.30 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat KPK ITPROV Jambi ✓
Acara : Rapat penyampaian Laporan Realisasi Capaian
Kinerja, Keuangan dan Kebijakan Triwulan III
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



INSPEKTUR,

H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP

Pembina Utama Madya

NIP. 19690818 199703 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen M.T. Haryono No. 2, Telanaipura, Jambi
Telp.(0741) 61606 – Fax. (0741) 62317, Website : www.inspektorat@jambiprov.go.id

NOTULEN RAPAT

Hari/Tgl : Senin, 7 Oktober 2024
Waktu : 08.30 Wib s.d Selesai
Materi : Rapat Evaluasi Renja Triwulan III Tahun 2024
Pimpinan Rapat : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
Peserta : (Datar Terlampir)

A. Pemaparan (Pimpinan Rapat)

Menindaklanjuti Pasal 181 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya Pemerintah Pusat Mendorong Pemerintah Daerah agar dapat mempercepat pelaksanaan dan realisasi Program Kegiatan yang telah di anggarkan/disusun. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi adalah salah satu bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini sebagaimana yang di jelaskan di dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 tahun 2021 tentang "Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi", pada Pasal 3 yang berbunyi : Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. Kesimpulan Rapat antara lain :

1. Dalam rangka monitoring dan evaluasi internal akan dilaksanakan rapat berkala secara intern Bidang/Seksi yang melaksanakan kegiatan, sehingga akan mempercepat pelaksanaan kegiatan baik serapan maupun realisasi akan dicapai.
2. Dalam rangka upaya percepatan realisasi kegiatan triwulan III tahun 2024 berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capain kegiatan masih rendah dari target yang telah ditetapkan yang tertuang dalam anggaran kas pada SIPD.
3. Rapat berjalan dengan lancar dan dilaksanakan dengan mekanisme diskusi dan tanya jawab kepada masing – masing Penanggung Jawab Teknis Kegiatan, sudah sejauh mana serapan dari masing – masing kegiatan.
4. Dalam diskusi tersebut juga di bahas kendala dan permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga serapan kegiatan dipandang masih rendah dari yang di harapkan. (Terlampir)

Jambi,
NOTULIS,

Hj. Yunita Meri Rahmi, S.E.M.M

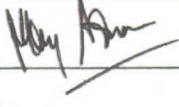
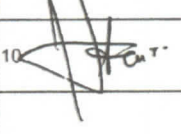
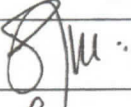
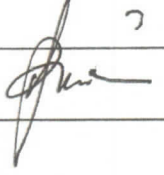
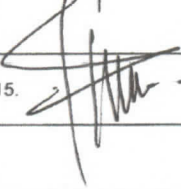
Plt. Kasubbag Perencanaan & Keuangan
NIP. 19770314 200012 2 004

**Dokumentasi Rapat Penyampaian Laporan Realisasi Capaian Kinerja, Keuangan
dan Kebijakan Triwulan III Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
Senin, 7 Oktober 2024**



DAFTAR HADIR

Peserta

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. Agus Merianto .S.H	INSPEKTUR	1. 
2.	Drs. Mahrup , M . si	SEKRETARIS	2. /
3.	Mat Sanusi , S . P .	IRBAN SUS	3.
4.	Yopie Said Ramadhany .S.E	IRBAN II	4.
5.	Waniso , S . E . M . si	PPUPD	5. 
6.	M . MUSTOFA .	Kasubbaq . Evlap	6.
7.	Yunita Meri Rahmi	PUT . Perencanaan	7. 
8.	Fitria Angaraini	PTT	8. 
9.	Adi Pratama Putra	PTT	9. /
10.	Hendra Wijaya	PPUPD	10. 
11.	Maison	PTT	11. 
12.	Nia Salsabila	PTT	12. 
13.	Sarwan	PTT .	13. 
14.	Dany Nurmaen	PTT .	14. 
15.	Misbah elumpul	Anggota umum .	15. 
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.
25.			25.

Evaluasi Renja

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI
RENJA PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PROVINSI JAMBE
PERIODE PELAKSANAAN : 2024

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:

1 Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat

2 Persentase tindak lanjut temuan BPK RI

3 Nilai Capaian MCP KPK

4 Tingkat Maturlitas SPPI

5 Tingkat Kapabilitas APPI

6 Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah

7 Persentase APPI yang memiliki sertifikat kompetensi Profesi

Target Realisasi

70 75

71 69,54

0

3 3

3 3

84,5 85

25 25

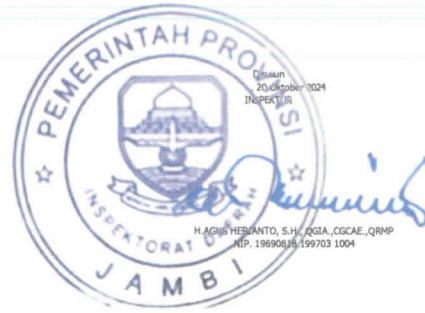
No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
								I		II		III		IV													
								1	2	3	4	5	6	7	8						9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Sesuai RKPD	Persen	80	461.44.000.783	90,83	76	5.226.553.042	94,12	648.223.723	94,12	1.824.725.998	94,12	1.157.319.123		94,12	3.630.268.844	123,84	69,46	92,475	3.630.268.844	115,59	7,87	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal	Persen	80	40.490.096.200	90,83	76	3.998.843.420	88,24	596.526.123	88,24	1.240.361.765	88,24	942.477.869		88,24	2.779.365.757	116,11	69,50	89,535	2.779.365.757	111,92	6,86	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	LAPORAN	280	9.313.918.391	54	56	753.664.000	14	122.588.157	14	469.245.560	14	78.999.500		42	670.793.217	75,00	89,00	96	670.793.217	34,29	7,20	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	LAPORAN	201	7.113.238.783	40	40	944.075.000	10	80.863.000	10	241.751.575	10	315.075.518		30	637.690.093	75,00	67,55	70	637.690.093	34,83	8,96	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.02.1.01.0003	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	LAPORAN	309	637.597.233	21	21	129.278.000	6			69.111.050		0		6	69.111.050	28,57	53,46	27	69.111.050	24,77	10,84	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.02.1.01.0004	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	LAPORAN	279	1.466.473.640	55	55	520.598.060	16	137.550.000	13	77.335.175	13	0		42	214.885.175	76,36	41,28	97	214.885.175	34,77	14,65	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	LAPORAN	307	13.702.729.693	21	21	840.796.160	6			248.369.205		402.443.000		6	650.812.205	28,57	77,40	27	650.812.205	25,23	4,75	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	DOKUMEN	775	8.256.138.453	155	155	810.432.200	41	255.524.966	38	134.549.200	38	145.999.851		117	536.074.017	75,48	66,15	272	536.074.017	35,10	6,49	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pelaksanaan pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persen	100	5.653.904.593	42,86	100	1.227.709.622	100	51.697.600	100	584.364.233	100	214.841.254		100	850.903.087	100,00	69,31	71,43	850.903.087	71,43	15,05	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.02.1.02.0001	Pengawasan Penyelidikan Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Turbutan Kerugian Negara/ Daerah yang dihangari	LAPORAN	10	415.598.950	2	2	166.971.210				86.703.405		0			86.703.405		51,93	2	86.703.405	20,00	20,86	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	LAPORAN	95	5.238.305.641	19	19	1.060.738.412	7	51.697.600	4	497.660.828	4	214.841.254		15	764.199.682	78,95	72,04	34	764.199.682	35,79	14,59	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIDAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan	Persen	60	14.441.916.279	34,56	48	2.026.107.595	35,35	107.775.620	35,35	516.254.645	35,35	305.658.622		35,35	929.688.887	73,65	45,89	34,955	929.688.887	58,26	6,44	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis yang selesai dirumuskan	REKOMENDASI	45		7	7	141.511.160	4			12.841.580				4	12.841.580	57,14	9,07	11	12.841.580	24,44		Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	REKOMENDASI	45	0	7	7	141.511.160	4			12.841.580		0		4	12.841.580	57,14	9,07	11	12.841.580	24,44		Inspektorat Daerah Provinsi	
Rata-rata capaian kinerja (%)							180.498.060.113			36.647.648.577		3.610.553.350		11.975.976.275		6.730.687.751			68,65	22.317.219.376	68,65	60,90		22.317.219.376	45,64	12,36	
Predikat Kinerja																		S	R								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Evaluasi Renja

No	Sasaran	Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
												I		II											III		IV	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Perentase OPD yang diberikan Pendampingan dan Asistensi	Persen	100	14.441.916.279	34,56		100	1.884.596.435	69,7	107.775.620	69,7	803.413.065	69,7	305.658.622		69,7	916.847.307	69,70	48,65	52,13	916.847.307	52,13	6,35	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	215	3.078.032.227	33		43	294.620.000	13	23.100.000	10	137.367.057	10	0		33	160.467.057	76,74	68,39	66	160.467.057	30,70	5,21	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	PERANGKAT DAERAH	215	936.261.123	23		43	162.031.060	10			90.157.000	0		10	90.157.000	23,26	55,64	33	90.157.000	15,35	9,63	Inspektorat Daerah Provinsi		
		6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	KEGIATAN	238	7.225.670.700	41		46	1.288.940.315	13	73.578.000	11	236.176.548	11	365.658.622		35	615.413.170	76,09	47,75	76	615.413.170	31,93	6,52	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengawasan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Pengawasan Integritas	PERANGKAT DAERAH	31	3.201.952.227	4		6	199.005.060		11.097.620	2	39.712.460	2	0		4	50.810.080	66,67	25,53	8	50.810.080	25,81	1,59	Inspektorat Daerah Provinsi	
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	X.XX.X01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat APDP	B	0	119.912.143.043	81		81	29.394.987.940	81	2.854.554.007		9.634.997.632		5.267.710.006		81	17.757.261.645	100,00	60,41	162	17.757.261.645		14,81	Inspektorat Daerah Provinsi	
		X.XX.X01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang selesai dirumuskan	DOKUMEN	109	1.711.749.961	21		21	714.110.920	3	349.410.800	6	109.540.200	6		15	458.950.800	71,43	64,27	36	458.950.800	33,03	26,81	Inspektorat Daerah Provinsi		
		6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DOKUMEN	24	902.270.120	4		4	199.794.168	1	149.988.260	1	7.974.000	1	0	3	157.962.260	75,00	79,06	7	157.962.260	29,17	17,51	Inspektorat Daerah Provinsi		
		6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LAPORAN	85	809.479.841	17		17	514.316.752	5	199.422.340	4	101.566.200	4	0	13	300.988.540	76,47	58,52	30	300.988.540	35,29	37,18	Inspektorat Daerah Provinsi		
		X.XX.X01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Persen	100	82.323.961.915	108,16		100	20.061.211.533	100	1.576.241.700	107	8.072.236.339	107	4.815.414.287		107	14.463.892.326	107,00	72,10	107,98	14.463.892.326	107,98	17,57	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	500	82.323.961.915	108,16		100	20.061.211.533	100	1.576.241.700	107	8.072.236.339	107	4.815.414.287		107	14.463.892.326	107,00	72,10	215,16	14.463.892.326	43,03	17,57	Inspektorat Daerah Provinsi	
		X.XX.X01.1.05	Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	Perentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persen	100	12.443.938.528	54,29		100	2.537.849.075		469.277.566	163,16	514.651.812	163,16			163,16	983.929.378	163,16	38,77	108,725	983.929.378	108,73	7,91	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	370	12.443.938.528	115,71		75	2.537.849.075		469.277.566	31	514.651.812	31	0	31	983.929.378	41,33	38,77	146,71	983.929.378	39,65	7,91	Inspektorat Daerah Provinsi		
		X.XX.X01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Persen	100	9.681.169.862	35,59		100	1.756.114.298	93,75	268.490.472	93,75	562.135.610	93,75	208.478.169		93,75	1.039.104.251	93,75	59,17	64,67	1.039.104.251	64,67	10,73	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	PAKET	60	162.447.207	12		12	32.449.318				10.388.540	0			10.388.540		32,01	12	10.388.540	20,00	6,40	Inspektorat Daerah Provinsi		
		6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	PAKET	60	451.757.905	12		12	99.995.100	3	8.900.000	3	33.080.030	3	0	9	41.980.030	75,00	41,96	21	41.980.030	35,00	9,29	Inspektorat Daerah Provinsi		
Rata-rata capaian kinerja (%)						180.498.060.113				36.647.648.577		3.610.553.350		11.975.976.275		6.730.687.751			96,65	22.317.219.376	68,65	60,90		22.317.219.376	45,64	12,36		
Predikat Kinerja																		S	R					SR	SR			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renje Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Evaluasi Renja

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Purangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV												
								1	2	3	4	5	6	7	8						9	10	11	12	13	14 = 13/8x100
						IK	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	PAKET	144	883.095.993	28	28	151.020.000	7	2.569.000	7	8.566.000	7	0		21	11.138.000	75,00	7,38	49	11.138.000	34,03	1,28	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	PAKET	60	636.507.184	12	12	127.600.250	3			61.762.000		0		3	61.762.000	25,00	48,40	15	61.762.000	25,00	9,70	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	132.386.123	12	12	29.062.837	3			750.000		0		3	750.000	25,00	2,58	15	750.000	25,00	0,57	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LAPORAN	2.500	7.414.975.476	500	500	1.315.986.793	125	257.021.472	125	447.586.040	125	268.478.169		375	913.085.681	75,00	69,38	875	913.085.681	35,00	12,31	Inspektorat Daerah Provinsi
		X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persen	100	2.480.000.000	100	100	1.359.946.830									50				50,00			Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	UNIT	239	2.480.000.000	7	8	1.399.946.830									7				2,93			Inspektorat Daerah Provinsi
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor	Persen	100	4.789.248.250	100	100	1.198.296.084	100	160.324.069	100	167.189.537	100	125.000.000		100	452.513.606	100,00	37,76	100	452.513.606	100,00	9,45	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	LAPORAN	60	335.971.660	12	12	101.975.520	3	24.704.000	3	23.832.500	3	0		9	48.536.500	75,00	47,60	21	48.536.500	35,00	14,45	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	LAPORAN	60	1.367.683.502	12	12	372.545.000	3	70.766.469	3	61.762.055	3	0		9	132.528.524	75,00	35,57	21	132.528.524	35,00	9,69	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	LAPORAN	60	451.757.905	12	12	49.737.500	3	10.300.000	3	3.582.300	3	0		9	13.882.300	75,00	27,91	21	13.882.300	35,00	3,07	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	LAPORAN	60	2.633.835.183	12	12	674.038.064	3	54.553.600	3	78.012.682	3	125.000.000		9	257.566.282	75,00	38,21	21	257.566.282	35,00	9,78	Inspektorat Daerah Provinsi
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Persen	100	6.482.074.497	69,76	100	1.767.459.200	100	30.809.600	100	206.244.134	100	118.817.550		100	358.871.284	100,00	20,30	84,88	358.871.284	84,88	5,54	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibersihkan Pakajnya	UNIT	56	787.999.660	10	13	283.270.000	3	9.827.400	3	79.495.749	3	81.968.000		9	121.291.149	69,23	42,82	19	121.291.149	33,93	15,39	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibersihkan Pajak dan Perizinannya"	UNIT	112	1.554.672.933	21	24	325.490.000	6	1.475.000	6	74.587.142	6	26.016.000		18	102.078.142	75,00	31,36	39	102.078.142	34,82	6,57	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	UNIT	170	900.900.310	170	170	177.990.000	44	7.384.000	42	30.914.843	42	0		128	38.298.848	75,29	21,52	298	38.298.843	175,29	4,25	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	UNIT	14	3.238.501.592	4	2	980.709.200		12.123.200	0,5	24.246.400	0,5	60.833.550		1	97.203.150	50,00	9,91	5	97.203.150	35,71	3,00	Inspektorat Daerah Provinsi
Rata-rata capaian kinerja (%)							180.498.060.113			36.647.648.577		3.610.553.350		11.975.978.275		6.730.687.751		86,65	22.317.219.376	68,65	60,90		22.317.219.376	45,64	12,36	
Predikat Kinerja																	S	R						SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										



Dievaluasi
20 Oktober 2024
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Ir. Agus Sunaryo, M.Si
NIP. 196608141993031004



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen.M.T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317
JAMBI – 36122

Jambi, 6 Januari 2025

Nomor : UND- 1 /ITPROV-1.1/I/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan Rapat Penyampaian Laporan
Realisasi Capaian Kinerja, Keuangan
dan Kebijakan Triwulan IV Inspektorat
Daerah Provinsi Jambi

Yth, Pejabat Struktural, JFT dan
Staf Terkait
di-
Jambi

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta menindaklanjuti penyampaian Laporan Realisasi Capaian Kinerja, Keuangan dan Kebijakan Triwulan IV Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagaimana terlampir.

Sehubungan hal tersebut di atas, kami mengundang Saudara untuk dapat hadir pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Januari 2024
Pukul : 08.30 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Inspektur Provinsi Jambi
Acara : Rapat penyampaian Laporan Realisasi Capaian
Kinerja, Keuangan dan Kebijakan Triwulan IV
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



INSPEKTUR,


H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP

Pembina Utama Madya

NIP. 19690818 199703 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen.M.T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317
JAMBI – 36122

NOTULEN RAPAT

Hari/Tgl : Rabu, 8 Januari 2025
Waktu : 08.30 Wib s.d Selesai
Materi : Rapat Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2024
Pimpinan Rapat : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
Peserta : (Datar Terlampir)

A. Pemaparan (Pimpinan Rapat)

Menindaklanjuti Pasal 181 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya Pemerintah Pusat Mendorong Pemerintah Daerah agar dapat mempercepat pelaksanaan dan realisasi Program Kegiatan yang telah di anggarkan/disusun. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi adalah salah satu bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini sebagaimana yang di jelaskan di dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 tahun 2021 tentang "Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi", pada Pasal 3 yang berbunyi : Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. Kesimpulan Rapat antara lain :

1. Dalam rangka monitoring dan evaluasi internal akan dilaksanakan rapat berkala secara intern Bidang/Seksi yang melaksanakan kegiatan, sehingga akan mempercepat pelaksanaan kegiatan baik serapan maupun realisasi akan dicapai.
2. Dalam rangka upaya percepatan realisasi kegiatan triwulan IV tahun 2024 berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capain kegiatan masih rendah dari target yang telah ditetapkan yang tertuang dalam anggaran kas pada SIPD.
3. Rapat berjalan dengan lancar dan dilaksanakan dengan mekanisme diskusi dan tanya jawab kepada masing – masing Penanggung Jawab Teknis Kegiatan, sudah sejauh mana serapan dari masing – masing kegiatan.
4. Dalam diskusi tersebut juga di bahas kendala dan permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga serapan kegiatan dipandang masih rendah dari yang di harapkan (Terlampir)

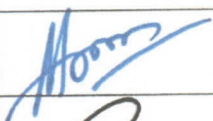
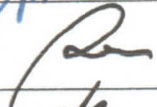
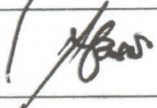
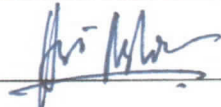
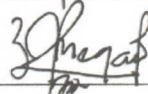
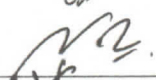
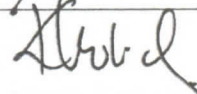
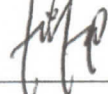
Jambi,
NOTULIS,

Hj. Yunita Meri Rahmi, S.E., M.M
Kasubbag Perencanaan & Keuangan
NIP. 19770314 200012 2 004

**Dokumentasi Rapat Penyampaian Laporan Realisasi Capaian Kinerja, Keuangan
dan Kebijakan Triwulan IV Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
Rabu, 8 Januari 2025**



DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	H. Agus herianto ISH	Inspektur	
2	Mat Sanusi	insur-	
3	Reza	Urban III	
4	Husron Hnabab	Ka Sub by Lemu	
5	HM Saman K	Urban I	
6	HUSNI MUSTHADAD	KASUBBAG EVLAP	
7			
8	Hugneto	Stp	
9	WARISTO	KASUBBAG DK	
10	Ferry F	Kepigazatan & Umumy	
11	Esterida MT	PPUPD Madya	
12	Nuri Andriyani	Auditor Madya	
13	M. Wul-d	Auditor Muka	
14	Rini Mucifera	Auditor Madya	
15	Junita Muri Rahmi	FU	
16	Wardah Ayu H.	Auditor pertama	
17	ANA GITMANI	PPUPD MUDA	
18	Andi APOTRO	STOK KASUBBAG UMUM	
19	M. ICHWAN	STAF KCU & Perencanaan	
20	TITA WIDYA UTARI	STAFF EVLAP	

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI
RENJA PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI
PERIODE PELAKSANAAN : 2024

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPd:		Target Realisasi
1	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat	70 78,67
2	Persentase tindak lanjut temuan BPK RI	71 78
3	Nilai Capaian MCP KPK	0
4	Tingkat Matritas SPSP	3 3
5	Tingkat Kapabilitas APSP	3 3
6	Indeks kepuasan audit atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah	84,5 85
7	Persentase APSP yang memiliki sertifikat kompetensi Profesi	25 25

Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
								I		II		III		IV															
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			13			14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Sesuai PKPT	Persen	80	46.144.000.791	90,83	76	5.326.553.042	94,12	648.223.723	94,12	1.824.723.998	94,12	1.157.319.123	94,12	2.034.385.020	94,12	5.664.653.864	123,84	108,38	92,475	5.664.653.864	115,59	12,28	Inspektorat Daerah Provinsi		
		6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal	Persen	80	40.490.096.200	90,83	76	3.968.843.420	88,24	596.526.123	88,24	1.240.361.765	88,24	942.477.869	88,24	1.606.919.400	88,24	4.386.285.157	116,11	109,60	89,535	4.386.285.157	111,92	10,83	Inspektorat Daerah Provinsi		
		6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	LAPORAN	280	9.313.918.391	54	56	753.664.000	14	122.588.157	14	469.245.560	14	78.959.500	14	454.732.600	56	1.125.525.817	100,00	149,36	130	1.125.525.817	39,29	12,08	Inspektorat Daerah Provinsi		
		6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	LAPORAN	201	7.113.238.783	40	40	944.075.000	10	80.863.000	10	241.751.575	10	315.075.518	10	444.690.800	40	1.082.380.893	100,00	114,65	80	1.082.380.893	39,80	15,22	Inspektorat Daerah Provinsi		
		6.01.02.1.01.0003	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	LAPORAN	109	637.597.235	21	21	129.278.000	6		69.111.050		0	5	103.257.100	11	172.368.150	52,38	133,33	32	172.368.150	29,36	27,00	Inspektorat Daerah Provinsi			
		6.01.02.1.01.0004	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	LAPORAN	279	1.466.473.640	35	35	520.598.060	16	137.550.000	13	77.335.175	13	0	13	361.082.200	55	575.967.375	100,00	110,66	130	575.967.375	39,43	39,28	Inspektorat Daerah Provinsi		
		6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	LAPORAN	107	13.702.729.693	21	21	840.796.160	6		248.369.205		402.443.000	5	22.173.400	11	672.985.605	52,38	80,00	32	672.985.605	29,91	4,91	Inspektorat Daerah Provinsi			
		6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	DOKUMEN	775	8.256.138.458	155	155	810.432.200	41	255.524.966	38	134.549.200	38	145.999.851	38	220.983.300	155	757.057.317	100,00	93,41	330	757.057.317	40,00	9,17	Inspektorat Daerah Provinsi		
		6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pelaksanaan pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persen	100	5.653.904.891	42,86	100	1.227.709.822	100	51.697.600	100	584.364.233	100	214.841.254	100	427.465.620	100	1.278.368.707	100,00	104,13	71,43	1.278.368.707	71,43	22,61	Inspektorat Daerah Provinsi		
		6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelidikan Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelidikan Tuntutan Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	LAPORAN	10	415.598.950	2	2	166.971.210			86.703.405		0		44.467.060		131.170.465		78,56	2	131.170.465	20,00	31,56	Inspektorat Daerah Provinsi			
		6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	LAPORAN	95	5.238.305.641	19	19	1.060.738.412	7	51.697.600	6	497.660.828	4	214.841.254	4	382.998.560	19	1.147.198.242	100,00	108,15	38	1.147.198.242	40,00	21,90	Inspektorat Daerah Provinsi		
		6.01.03	PROGRAM PERUMPUAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan	Persen	60	14.441.916.279	34,56	48	2.026.107.895	35,35	107.775.620	35,35	516.294.645	35,35	305.658.622	35,35	836.848.594	35,35	1.766.537.481	73,65	87,19	34,985	1.766.537.481	58,26	12,23	Inspektorat Daerah Provinsi		
		6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis yang selesai dirumuskan	REKOMENDASI	45		7	7	141.511.160	4		12.841.580			1	102.965.000	5	115.806.580	71,43	81,84	12	115.806.580	26,67		Inspektorat Daerah Provinsi			
		6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	REKOMENDASI	45	0	7	7	141.511.160	4		12.841.580		0	1	102.965.000	5	115.806.580	71,43	81,84	12	115.806.580	26,67		Inspektorat Daerah Provinsi			
		6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang diberikan Pendampingan dan Asistensi	Persen	100	14.441.916.279	34,56	100	1.884.596.435	69,7	107.775.620	69,7	503.413.065	69,7	305.658.622	69,7	733.883.594	69,7	1.650.730.901	69,70	87,59	52,13	1.650.730.901	52,13	11,43	Inspektorat Daerah Provinsi		
Rata-rata capaian kinerja (%)							180.498.060.113			36.847.648.577		3.610.553.350		11.975.978.275		6.730.687.751		12.155.148.974	89,39	34.472.368.350	89,39	94,06		34.472.368.350	49,56	19,10			
Predikat Kinerja																	T	ST							SR	SR			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

No	Sasaran	Kode	Uraian / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja (Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampel dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
								I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	215	3.078.032.227	33	43	234.620.000	13	23.100.000	10	137.367.057	10	41.000.000	43	201.467.057	100,00	85,87	76	201.467.057	35,35	6,55	Inspektorat Daerah Provinsi		
		6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	PERANGKAT DAERAH	215	936.261.125	23	43	162.031.060	10			90.157.000	0	34.919.900	20	125.076.900	46,51	77,19	43	125.076.900	20,00	13,36	Inspektorat Daerah Provinsi		
		6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	KEGIATAN	238	7.225.670.700	41	46	1.288.940.315	13	73.578.000	11	236.176.548	11	305.658.622	11	532.353.244	46	1.147.766.414	100,00	89,05	87	1.147.766.414	36,55	15,88	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	PERANGKAT DAERAH	31	3.201.952.227	4	6	199.005.060		11.097.620	2	39.712.460	2	0	2	125.610.490	6	176.420.530	100,00	88,65	10	176.420.530	32,26	5,51	Inspektorat Daerah Provinsi
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	XXX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat APSP	8	0	119.912.143.043	81	81	29.394.987.940	81	2.854.554.007		9.634.997.632		5.267.710.006		9.283.915.360	81	27.041.177.005	100,00	91,99	162	27.041.177.005	22,55		Inspektorat Daerah Provinsi
		XXX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang selesai diumumkan	DOKUMEN	109	1.711.749.961	21	21	714.110.920	3	349.410.600	6	109.540.200	6		6	382.271.100	21	841.221.900	100,00	117,80	42	841.221.900	38,53	49,14	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DOKUMEN	24	902.270.120	4	4	199.794.168	1	149.988.260	1	7.974.000	1	0	1	38.789.000	4	196.753.260	100,00	98,48	8	196.751.260	33,33	21,81	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LAPORAN	85	889.479.841	17	17	514.316.752	5	199.422.340	4	101.566.200	4	0	4	343.482.100	17	644.470.640	100,00	125,31	34	644.470.640	40,00	79,62	Inspektorat Daerah Provinsi
		XXX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Persen	100	82.323.961.915	108,16	100	20.061.211.533	100	1.576.241.700	107	8.072.236.339	107	4.815.414.287	100	6.559.777.644	100	21.023.669.970	100,00	104,80	104,08	21.023.669.970	104,08	25,54	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.02.0001	Penyetoran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	500	82.323.961.915	108,16	100	20.061.211.533	100	1.576.241.700	107	8.072.236.339	107	4.815.414.287	107	6.559.777.644	107	21.023.666.970	107,00	104,80	215,16	21.023.669.970	43,03	25,54	Inspektorat Daerah Provinsi
		XXX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persen	100	12.443.938.528	54,29	100	2.537.849.075		469.277.566	163,16	514.651.812	163,16		100	269.264.320	100	1.253.193.698	100,00	49,38	77,145	1.253.193.698	77,15	10,07	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	370	12.443.938.528	115,71	75	2.537.849.075		469.277.566	31	514.651.812	31	0	31	269.264.320	31	1.253.193.698	41,33	49,38	146,71	1.253.193.698	39,65	10,07	Inspektorat Daerah Provinsi
		XXX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Persen	100	9.681.169.892	35,59	100	1.756.114.298	93,75	268.490.472	93,75	562.135.610	93,75	208.478.169	93,75	656.330.888	93,75	1.695.435.139	93,75	96,54	64,67	1.695.435.139	64,67	17,51	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.06.0001	Penyetoran Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	PAKET	60	162.447.207	12	12	32.449.318				10.388.540	0	3	21.425.240	3	31.813.780	25,00	98,08	15	31.813.780	25,00	19,58	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.01.1.06.0002	Penyetoran Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	PAKET	60	451.757.905	12	12	99.995.100	3	8.900.000	3	33.080.030	3	0	3	56.932.530	12	98.912.560	100,00	98,92	24	98.912.560	40,00	21,90	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.06.0004	Penyetoran Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	PAKET	144	883.095.995	28	28	151.020.000	7	2.569.000	7	8.569.000	7	0	7	47.884.580	28	59.022.580	100,00	39,08	56	59.022.580	38,89	6,68	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.06.0005	Penyetoran Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	PAKET	60	636.507.184	12	12	127.600.250	3			61.762.000	0	3	42.845.020	6	104.607.020	50,00	81,98	18	104.607.020	30,00	16,43	Inspektorat Daerah Provinsi	
Rata-rata capaian kinerja (%)						180.498.060.113				36.647.648.577		3.610.553.350		11.975.978.275		6.730.687.751		12.155.148.974	89,39	34.472.368.350	89,39	94,06		34.472.368.350	49,56	19,10	
Predikat Kinerja																											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Evaluasi Renja

No	Sasaran	Kode	Uraian / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
									I		II											III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	132.386.125	12	12	29.062.837	3		750.000		0	3	1.500.000	6	2.250.000	50,00	7,74	18	2.250.000	30,00	1,70	Inspektorat Daerah Provinsi				
		6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LAPORAN	2.500	7.414.975.476	500	500	1.315.986.793	125	257.021.472	125	447.586.040	125	208.478.169	125	485.743.518	500	1.398.829.199	100,00	106,30	1.000	1.398.829.199	40,00	18,86	Inspektorat Daerah Provinsi			
		XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persen	100	2.480.000.000	100	100	1.359.946.830							100		100		100,00		100		100,00		Inspektorat Daerah Provinsi			
		6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	UNIT	239	2.480.000.000	7	8	1.359.946.830						2			2		175,00		9		3,77	Inspektorat Daerah Provinsi				
		XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor	Persen	100	4.789.248.250	100	100	1.198.296.084	100	160.324.069	100	167.189.537	100	125.000.000	100	538.210.518	100	990.724.124	100,00	82,68	100	990.724.124	100,00	20,69	Inspektorat Daerah Provinsi			
		6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	LAPORAN	60	335.971.660	12	12	101.975.520	3	24.704.000	3	23.832.500	3	0	3	46.816.500	12	95.353.000	100,00	93,51	24	95.353.000	40,00	28,38	Inspektorat Daerah Provinsi			
		6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	LAPORAN	60	1.367.683.502	12	12	372.545.000	3	70.766.469	3	61.762.055	3	0	3	236.710.466	12	369.239.010	100,00	99,11	24	369.239.010	40,00	27,00	Inspektorat Daerah Provinsi			
		6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	LAPORAN	60	451.757.905	12	12	49.737.500	3	10.300.000	3	3.582.300	3	0	3	15.699.550	12	29.581.850	100,00	99,48	24	29.581.850	40,00	6,55	Inspektorat Daerah Provinsi			
		6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	LAPORAN	60	2.633.835.183	12	12	674.038.064	3	54.553.600	3	78.012.682	3	125.000.000	3	238.983.982	12	496.550.264	100,00	73,67	24	496.550.264	40,00	18,85	Inspektorat Daerah Provinsi			
		XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Persen	100	6.482.074.497	69,76	100	1.767.459.200	100	30.809.600	100	209.244.134	100	118.817.550	100	878.060.890	100	3.236.932.174	100,00	69,88	84,88	1.236.932.174	84,88	19,08	Inspektorat Daerah Provinsi			
		6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	UNIT	56	787.999.660	10	13	283.270.000	3	9.827.400	3	79.495.749	3	31.968.000	3	141.692.389	12	262.983.538	92,31	92,84	22	262.983.538	39,29	33,37	Inspektorat Daerah Provinsi			
		6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pertinisan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Pertinisanya"	UNIT	112	1.554.672.935	21	24	325.490.000	6	1.475.000	6	74.587.142	6	26.016.000	6	123.461.300	24	225.539.442	100,00	69,29	45	225.539.442	40,18	14,51	Inspektorat Daerah Provinsi			
		6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	UNIT	170	900.900.310	170	170	177.990.000	44	7.384.000	42	30.914.843	42	0	42	0	170	38.298.843	100,00	21,52	340	38.298.843	200,00	4,25	Inspektorat Daerah Provinsi			
		6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	UNIT	14	3.238.501.592	4	2	980.709.200		12.123.200	0,5	24.246.400	0,5	60.833.550	1	612.907.204	2	710.110.351	100,00	72,41	6	710.110.351	42,86	21,93	Inspektorat Daerah Provinsi			
Rata-rata capaian kinerja (%)						180.498.060.113		36.647.648.577		3.610.553.350		11.975.978.275		6.730.687.751		12.155.148.974		89,39		34.472.366.350		89,39		98,06		34.472.366.350		49,56		19,10
Predikat Kinerja																		T		ST						SR		SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														



Dibuat
22 Januari 2025
INSPEKTUR

Dievaluasi
22 Januari 2025
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jr. Sunaryo, H.Si
NIP. 196808141990301004

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:

Target Realisasi

ps://pakat.jambiprov.go.id/atgov-api/renstra_laporan/renja_prov?encotz=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0b2t1bG16IjBjBINjA4YmYzLTQ3YzItNDliO1i1NiY2LTVkMWZkMzhmZWVmZCJ9.Ax1GLUpzKQyd...

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp								K	Rp	K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12	13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 8 x 100%		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	yang dilakukan pendampingan																							Provinsi	
		6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis yang selesai dirumuskan	REKOMENDASI	45		5	12.841.580	7	284.162.650	1	61.939.550					1	61.939.550	14,29	21,80	6	74.781.130	13,33			Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	REKOMENDASI	45	0	5	12.841.580	4	284.162.650	1	61.939.550					1	61.939.550	25,00	21,80	6	74.781.130	13,33			Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang diberikan Pendampingan dan Asistensi	Persen	100	14.441.916.279	69,7	916.847.307	100	1.884.582.435	100	10.066.800					100	10.066.800	100,00	0,53	84,85	926.914.107	84,85	6,42		Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	215	3.078.032.227	43	160.467.057	43	234.620.000											43	160.467.057	20,00	5,21		Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	PERANGKAT DAERAH	215	936.261.125	20	90.157.000	43	162.017.060	10	6.840.000					10	6.840.000	23,26	4,22	30	96.997.000	13,95	10,36		Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	KEGIATAN	238	7.225.670.700	46	615.413.170	50	1.288.940.315											46	615.413.170	19,33	8,52		Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	PERANGKAT DAERAH	31	3.201.952.227	6	50.810.080	8	199.005.060	2	3.226.800					2	3.226.800	25,00	1,62	8	54.036.880	25,81	1,69		Inspektorat Daerah Provinsi	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	X.JX.X.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	SKOR	0	119.912.143.043	81	17.905.885.081	81,7	36.856.182.904	81,7	4.519.869.673					81,7	4.519.869.673	100,00	12,26	162,7	22.425.754.754			18,70		Inspektorat Daerah Provinsi
		X.JX.X.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang selesai dirumuskan	DOKUMEN	109	1.711.749.961	21	458.950.800	23	1.389.256.816	5	26.153.265					5	26.153.265	21,74	1,88	26	485.104.065	23,85	28,34		Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DOKUMEN	24	902.270.120	4	157.962.260	6	374.940.064	1	4.489.500					1	4.489.500	16,67	1,20	5	162.451.760	20,83	18,00		Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LAPORAN	85	809.479.841	17	300.988.540	17	1.014.316.752	4	21.663.765					4	21.663.765	23,53	2,14	21	322.652.305	24,71	39,86		Inspektorat Daerah Provinsi	
Rata-rata capaian kinerja (%)							180.498.060.113		22.465.842.812		46.214.106.649		4.800.277.713					32,80	4.800.277.713	32,80	10,39		27.266.120.525	38,77	15,11			
Predikat Kinerja																		SR	SR					SR	SR			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Kebijakan pengawasan yang mendorong untuk tetap terlaksanya kegiatan pembinaan dan pengawasan.																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						efisiensi anggaran																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						Melaksanakan pengawasan sesuai dengan PKPT dan lebih selektif memilih kegiatan pengawasan yang tidak terdapat dalam PKPT																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Provinsi berikutnya*):																												

No	Seseran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I	II	III	IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	12	13		14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	17					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemerataan Gaji dan Tunjangan ASN	Persen	100	82.323.961.915	100	14.463.892.326	100	22.050.963.088	100	4.353.724.361					100	4.353.724.361	100,00	19,74	100	18.817.616.687	100,00	22,86	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	500	82.323.961.915	107	14.463.892.326	102	22.050.963.088	114	4.353.724.361				114	4.353.724.361	111,76	19,74	221	18.817.616.687	44,20	22,86	Inspektorat Daerah Provinsi		
		X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persen	100	12.443.938.528	100	983.929.378	100	3.187.840.717	100	3.450.285				100	3.450.285	100,00	0,11	100	987.379.683	100,00	7,93	Inspektorat Daerah Provinsi		
		6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut Pendidikan dan Pelatihan	orang	370	12.443.938.528	31	983.929.378	75	2.677.010.092									31	983.929.378	8,38	7,91	Inspektorat Daerah Provinsi			
		6.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peserta yang mengikut Sosialisasi Perundang- undangan	orang	0	0	0		250	410.830.625		3.450.285				3.450.285		0,84		3.450.285			Inspektorat Daerah Provinsi			
		6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	0	0		1	100.000.000													Inspektorat Daerah Provinsi			
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemerataan Sarana dan Prasarana Kerja	Persen	100	9.681.169.892	93,75	1.039.104.251	100	2.052.318.299	100	96.741.596				100	96.741.596	100,00	4,71	96,875	1.135.845.847	96,88	11,73	Inspektorat Daerah Provinsi		
		6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	PAKET	60	162.447.207	3	10.388.540	12	33.799.319	3	3.845.226				3	3.845.226	25,00	11,38	6	14.233.766	10,00	8,76	Inspektorat Daerah Provinsi		
		6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	PAKET	60	451.757.905	12	41.980.030	12	90.393.100	3	10.239.520				3	10.239.520	25,00	11,33	15	52.219.550	25,00	11,56	Inspektorat Daerah Provinsi		
		6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	PAKET	144	883.095.995	28	11.138.000	30	0									28	11.138.000	19,44	1,26	Inspektorat Daerah Provinsi			
		6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaian	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaian yang Disediakan	PAKET	60	636.507.184	6	61.762.000	12	132.400.250	3	17.274.050				3	17.274.050	25,00	13,05	9	79.036.050	15,00	12,42	Inspektorat Daerah Provinsi		
		6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	132.386.125	6	750.000	12	29.062.837									6	750.000	10,00	0,57	Inspektorat Daerah Provinsi			
		6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LAPORAN	2.500	7.414.975.476	500	913.085.681	500	1.766.662.793	125	65.382.800				125	65.382.800	25,00	3,70	625	978.468.461	25,00	13,20	Inspektorat Daerah Provinsi		
		X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemerataan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persen	100	2.480.000.000	100		100	4.532.123.700								50		50,00			Inspektorat Daerah Provinsi			
		6.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	0	0	0		5	3.052.563.000													Inspektorat Daerah Provinsi			
Rata-rata capaian kinerja (%)							180.498.060.113		22.465.842.812		46.214.106.649		4.800.277.713				32,80	4.800.277.713	32,80	10,39		27.266.120.525	38,77	15,11			
Predikat Kinerja																	SR	SR					SR	SR			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Kebijakan pengawasan yang mendorong untuk tetap terlaksana kegiatan pembinaan dan pengawasan.																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						efisiensi anggaran																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						Melaksanakan pengawasan sesuai dengan PKPT dan lebih selektif memilih kegiatan pengawasan yang tidak terdapat dalam PKPT																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Provinsi berikutnya*):																											

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									I	II	III	IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	12	13		14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	17			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				Dibayarkan Pajak dan Perizinannya																					
		6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	UNIT	239	2.480.000.000	2		7	1.479.560.700									2		199,16	Inspektorat Daerah Provinsi		
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemanfaatan Jasa Penunjang Kantor	Persen	100	4.789.248.250	100	452.513.606	100	1.216.741.084	100	33.738.566				100	33.738.566	100,00	2,77	100	486.252.172	100,00	10,15	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	LAPORAN	60	335.971.660	12	48.536.500	12	101.975.520	3	7.577.000				3	7.577.000	25,00	7,43	15	56.113.500	25,00	16,70	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	LAPORAN	60	1.367.683.502	12	132.528.524	12	424.500.000									12	132.528.524	20,00	9,69	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	LAPORAN	60	451.757.905	12	13.882.300	12	49.737.500									12	13.882.300	20,00	3,07	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	LAPORAN	60	2.633.835.183	12	257.566.282	12	640.528.064	3	26.161.566				3	26.161.566	25,00	4,08	15	283.727.848	25,00	10,77	Inspektorat Daerah Provinsi
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Persen	100	6.482.074.497	100	507.494.720	100	2.426.939.200	100	6.061.600				100	6.061.600	100,00	0,25	100	513.556.320	100,00	7,92	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	UNIT	56	787.999.660	12	121.291.149	13	283.270.000									12	121.291.149	21,43	15,39	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	UNIT	112	1.554.672.935	24	102.078.142	24	570.890.000									24	102.078.142	21,43	6,57	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	UNIT	170	900.900.310	170	38.298.843	170	177.990.000									170	38.298.843	100,00	4,25	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	UNIT	14	3.238.501.592	2	245.826.586	2	1.394.789.200	1	6.061.600				1	6.061.600	50,00	0,43	3	251.886.186	21,43	7,78	Inspektorat Daerah Provinsi
Rate-rata capaian kinerja (%)						180.498.060.113		22.465.842.812		46.214.106.649		4.800.277.713				32,80		4.800.277.713	32,80	10,39	27.266.120.525		38,77	15,11	
Predikat Kinerja																SR		SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Kebijakan pengawasan yang mendorong untuk tetap terlaksanya kegiatan pembinaan dan pengawasan.																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						efisiensi anggaran																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						Melaksanakan pengawasan sesuai dengan PKPT dan lebih selektif memilih kegiatan pengawasan yang tidak terdapat dalam PKPT																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Provinsi berikutnya*):																									



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Telanaipura, Jambi 36122
Telepon (0741) 60144, Faksimile (0741) 60400, Laman jambiprov.go.id

Jambi, 11 Juni 2025

Nomor : S-1247 /Bappeda-2.3/VI/2025
Lampiran : satu berkas
Perihal : **Permintaan Evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2025**
Kepada
Yth. (daftar terlampir)
di -

Tempat

Pasal 258 dan Pasal 259 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Kepala Perangkat Daerah melaksanakan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan menyampaikan laporan hasil evaluasi dimaksud ke Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

Sehubungan dengan akan berakhirnya triwulan II Tahun Anggaran 2025, maka diminta kepada Kepala Perangkat Daerah agar segera melaksanakan penginputan Evaluasi pelaksanaan Renja triwulan II melalui aplikasi Pelaporan Kinerja Evaluasi Terintegrasi (**PAKET**) paling lambat tanggal 05 Juli 2025. Selanjutnya mengirimkan laporan dalam bentuk *hardcopy* disampaikan ke Gubernur Jambi Cq. Kepala Bappeda Provinsi Jambi.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH,

u.b

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN



JOHANSYAH, S.E., M.E.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19700615 200003 1 003

Tembusan

1. Gubernur Jambi sebagai laporan
2. Arsip

Lampiran I : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
Surat Nomor : S-1247/Bappeda-2.3/VI/2025
Tanggal : 11 Juni 2025

Kepada Yth:

1. Inspektur Provinsi Jambi.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
4. Kepala Badan Pengembangan SDM Provinsi Jambi.
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.
7. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi.
8. Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.
9. Kepala Satuan Polisi dan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.
10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.
11. Direktur RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi.
12. Direktur Rumah Sakit Jiwa Derah Kolonel Infantri H. Muhammad Syukur Provinsi Jambi.
13. Sekretariat DPRD Provinsi Jambi.
14. Kepala Biro Pemerintahan dan OTDA Setda Provinsi Jambi.
15. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi.
16. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi.
17. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi.
18. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jambi.
19. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi.
20. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi.
21. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.
22. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.
23. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
24. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
25. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
26. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
27. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
28. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.
29. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.
30. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi.
31. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
32. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi.
33. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi.
34. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jambi.
35. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi.
36. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
37. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi.
38. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.
39. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
40. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
41. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
42. Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Jambi.
43. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen.M.T. Haryono No. 2 Telp.
(0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 JAMBI – 36122

NOTA DINAS

Kepada Yth : Inspektur Inspektorat Provinsi Jambi
Melalui : Sekretaris
Dari : Kasubag. Perencanaan dan Keuangan
Tanggal : 15 Juli 2025
Nomor : ND- 900/50/ITPROV-1.1/VII/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin untuk Menandatangani Laporan Evaluasi Renja Triwulan II Tahun anggaran 2025 Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor S-1247/Bappeda-2.3/VI/2025 Perihal Permintaan Evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2025 Tanggal 11 Juni 2025. Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan laporan Evaluasi Renja triwulan II tahun anggaran 2025 Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dan mohon perkenan Bapak untuk menandatangani Evaluasi Renja Triwulan II sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Sekretaris,

Drs. Revo Anhar, M.Si

Pembina TK.I

NIP. 19710712 199201 1 005



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen.M.T. Haryono No. 2 Telp.
(0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 JAMBI – 36122

Jambi, 15 Juli 2025

Nomor : S- 5/ /ITPROV-1.1/VII/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Pelaporan Kinerja Evaluasi
Terintegrasi (PAKET) Triwulan II
Tahun 2025**

Kepada
Yth, **Gubernur Jambi**
Cq. Kepala Bappeda Provinsi Jambi
di-
Tempat

Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor S-1247/Bappeda-2.3/VI/2025 Perihal Permintaan Evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2025 Tanggal 11 Juni 2025. Sehubungan hal tersebut dengan ini disampaikan laporan hasil capaian pelaksanaan kinerja triwulan II tahun anggaran 2025 Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melalui aplikasi Pelaporan Kinerja Evaluasi Terintegrasi (PAKET) sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, Terima kasih.



H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP
Pembina Utama Madya
NIP. 19690818 199703 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan)
2. Arsip.

1000

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1. Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat	75	75
2. Persentase tindak lanjut temuan BPK RI	73	77,96
3. Tingkat Mutu SIP	3	3
4. Tingkat Kapabilitas APIP	3	3
5. Indeks kepuasan masyarakat	85,3	85,3
6. Nilai SAKIP PERANGKAT DAERAH	81,7	81,7

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Rangka Perangkat Daerah Tahun Laku (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rensta s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rensta s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					6	7	8	9	10		11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%									
									K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Sesuai PKPT	Persen	80	46.144.000.791	94,12	3.630.268.944	78	7.189.178.660	25	208.401.690	50	1.088.527.097			50	1.296.928.787	64,10	18,04	72,06	4.927.197.631	90,88	10,68	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal	Persen	80	40.490.096.200	88,24	2.779.365.757	78	5.685.194.050	78	85.228.825	78	847.014.109			78	942.242.934	100,00	16,54	83,12	3.721.608.891	103,90	9,19	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	LAPORAN	280	9.313.918.391	56	670.793.217	58	1.721.005.600	14	8.587.650	15	102.140.000			29	110.727.650	50,00	6,43	85	781.520.867	30,36	8,39	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	LAPORAN	201	7.113.238.783	40	637.690.093	41	1.846.309.900	10	12.643.100	10	477.304.307			20	489.947.407	48,78	26,54	60	1.127.637.500	29,85	15,85	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	LAPORAN	109	637.997.235	11	69.111.050	1	50.275.800		3.039.025	1	12.150.000			1	15.189.025	100,00	30,21	12	84.300.075	11,01	13,22	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	LAPORAN	279	1.466.473.640	55	214.885.175	1	38.900.900		18.253.100	1	0			1	18.253.100	100,00	46,92	56	233.138.275	20,07	15,90	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	LAPORAN	107	13.702.729.693	11	650.812.205	22	1.014.192.050	5	6.905.150		5.733.000			5	12.638.150	22,73	1,25	16	663.450.355	14,95	4,84	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	DOKUMEN	775	8.256.138.458	155	536.074.017	155	1.024.509.800	38	45.800.800	39	249.686.802			77	295.487.602	49,68	28,84	232	831.561.619	29,94	10,07	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan Tertentu	Persen	100	5.653.904.591	100	856.903.087	100	1.493.984.610	100	113.172.865	100	241.512.888			100	354.885.853	100,00	23,74	100	1.205.588.940	100,00	21,32	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Tuntutan Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	LAPORAN	10	415.598.950	0	86.703.405	2	172.131.210	1	8.640.265		0			1	8.640.265	50,00	5,02	1	95.343.670	10,00	22,94	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	LAPORAN	95	5.238.305.641	19	764.199.682	19	1.321.853.400	4	104.532.600	5	241.512.988			9	346.045.588	47,37	26,18	28	1.110.245.270	29,47	21,19	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang dibelikan pendampingan	Persen	60	14.441.916.279	35,35	929.688.887	53	2.168.745.085	25	72.006.350	30	165.413.680			30	237.420.030	56,60	10,95	32,675	1.167.108.917	54,46	8,08	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang	Jumlah Kebijakan Teknis yang selesai	REKOMENDASI	45		5	12.041.580	7	284.162.650	1	61.938.550	1	4.672.720			2	66.812.270	28,57	23,44	7	79.453.850	15,56		Inspektorat Daerah
Rata-rata capaian kinerja (%)							180.498.060.113		22.465.842.812		46.214.106.649		4.800.277.713		11.552.011.349			58,58	16.352.289.062	58,58	35,38		38.818.131.874	43,20	21,51	
Predikat Kinerja																		R	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Provinsi berikutnya*):																										

https://paket.jambiprov.go.id/atgov-api/renstra_laporan/renja_prov?encotz=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0b2t0b1ti6ilBNjA4YmYzLTQ3Y2t0NDliOS1iNjY2LTVkMWZkMzhmZWVmZCJ9.Ax1GLUpzKQyd...

Evaluasi Renja

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)				Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Trwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																				
						7					I				II					III				IV																						
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10				11	12	13				14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17																		
		6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	370	12.443.938.528				31	983.929.378	75	2.677.010.092						18	36.029.880				24,00	1,35	49	1.019.959.258		13,24	8,20	Inspektorat Daerah Provinsi														
		6.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peserta yang mengikuti Sosialisasi Perundang-undangan	orang	0	0				0		250	410.830.625						62	42.713.000				24,80	11,24	62	46.163.285				Inspektorat Daerah Provinsi														
		6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	0				0		1	100.000.000																		Inspektorat Daerah Provinsi														
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Person	100	9.681.169.892				93,75	1.639.104.251	100	2.052.318.299				100	96.741.596				100	266.353.502						100	383.085.088		100,00	17,69	96,875	1.402.199.349	96,88	14,48	Inspektorat Daerah Provinsi							
		6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	PAKET	60	162.447.207				3	10.388.540	12	33.799.319				3	3.845.226				3	0				6	3.845.226				50,00	11,38	9	14.233.766		15,00	8,76	Inspektorat Daerah Provinsi						
		6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	PAKET	60	451.757.905				12	41.980.030	12	90.393.100				3	10.239.520				3	0				6	10.239.520				50,00	11,33	18	52.219.550		30,00	11,56	Inspektorat Daerah Provinsi						
		6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	PAKET	144	883.095.995				28	11.138.000	30	0													28	11.138.000				19,44	1,26			Inspektorat Daerah Provinsi										
		6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	PAKET	60	636.507.184				6	61.762.000	12	132.400.250				3	17.274.050				3	0				6	17.274.050				50,00	13,05	12	79.036.050		20,00	12,42	Inspektorat Daerah Provinsi						
		6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	132.386.125				6	750.000	12	29.062.837													6	750.000				10,00	0,57			Inspektorat Daerah Provinsi										
		6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LAPORAN	2.500	7.414.975.476				500	913.085.681	500	1.766.662.793				125	65.382.800				125	266.353.502						250	331.736.302				50,00	18,78	750	1.244.821.983		30,00	16,79	Inspektorat Daerah Provinsi				
		X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Person	100	2.480.000.000				100		100	4.532.123.700						100	2.619.440.500						100	2.619.440.500				100,00	57,80	100	2.619.440.500		100,00	105,62	Inspektorat Daerah Provinsi							
		6.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0				0		5	3.052.563.000						6	1.847.800.000						6	1.847.800.000				120,00	60,53	6	1.847.800.000				Inspektorat Daerah Provinsi							
		6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	UNIT	239	2.480.000.000				2		7	1.479.560.700						5	771.640.500						5	771.640.500				128,57	52,15	7	771.640.500		197,07	31,11	Inspektorat Daerah Provinsi							
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor	Person	100	4.789.248.250				100	452.513.606	100	1.216.741.084				100	33.738.566				100	310.672.119						100	344.410.685				100,00	28,31	100	796.924.291		100,00	16,64	Inspektorat Daerah Provinsi				
		6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	LAPORAN	60	335.971.660				12	48.536.500	12	101.975.520				3	7.577.000				3	30.380.500				6	37.957.500				50,00	37,22	18	86.494.000		30,00	25,74	Inspektorat Daerah Provinsi						
		6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	LAPORAN	60	1.367.683.502				12	132.528.524	12	424.900.000						3	128.807.419						3	128.807.419				25,00	30,34	15	261.335.943		25,00	19,11	Inspektorat Daerah Provinsi							
Rata-rata capaian kinerja (%)						180.498.060.113				22.465.842.812				46.214.106.649				4.800.277.713				11.552.011.349				58,58				16.352.289.062				58,58				38.818.131.874				43,20				21,51
Predikat Kinerja																										R				SR								SR				SR				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Provinsi berikutnya*):																																														

Evaluasi Renja

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Trivulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											I	II	III	IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10		11	12	13		14 = 13/8x100	15 = 7 + 13*	16 = 15 / 6 x 100%	17					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan																						
		6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	LAPORAN	60	451.757.905	12	13.882.300	12	49.737.500		3	7.850.000			3	7.850.000	25,00	15,78	15	21.732.300	25,00	4,81	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	LAPORAN	60	2.633.835.183	12	257.566.282	12	640.528.064	3	26.161.566	3	143.634.200			6	169.795.766	50,00	26,51	18	427.362.048	30,00	16,23	Inspektorat Daerah Provinsi
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perawatan Barang Milik Daerah yang terpelihara	Peran	100	6.482.074.497	100	507.494.720	100	2.426.939.200	100	6.061.600	100	138.980.000			100	145.041.600	100,00	5,98	100	652.536.320	100,00	10,07	Inspektorat Daerah Provinsi
		6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	UNIT	56	787.999.660	12	121.291.149	13	283.270.000		3	59.544.900			3	59.544.900	23,08	21,02	15	180.836.049	26,79	22,95	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	UNIT	112	1.554.672.935	24	102.078.142	24	570.890.000		6	35.543.700			6	35.543.700	25,00	6,23	30	137.621.842	26,79	8,85	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	UNIT	170	900.900.310	170	38.298.843	170	177.990.000		42	19.645.000			42	19.645.000	24,71	11,04	212	57.943.843	124,71	6,43	Inspektorat Daerah Provinsi	
		6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	UNIT	14	3.238.501.592	2	245.826.586	2	1.394.789.200	1	6.061.600	1	24.246.400			2	30.308.000	100,00	2,17	4	276.134.586	28,57	8,53	Inspektorat Daerah Provinsi
Rata-rata capaian kinerja (%)							180.498.060.113		22.465.942.812		46.214.106.649		4.800.277.713		11.552.011.349			58,58	16.352.289.062	58,58	35,38		38.818.131.874	43,20	21,51	
Predikat Kinerja																	R	SR					SR	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam trivulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Provinsi berikutnya*):																										